



FAHMI IDRIS DAN
ERMAN SUPARNO

RATMAN/SINDO



DJOKO KIRMANTO

TRUST/MULYANA



PURNOMO
YUSGIANTORO

TRUST/MULYANA

Nah, kalau orang dalam istana saja sudah kesal, maka tak heran jika mereka yang ada di luar merasa lebih geregetan. Menurut Dradjad Wibowo, anggota DPR dari Fraksi PAN, stabilitas makro yang selama ini dianggap sebagai prestasi tim ekonomi perlu dipertanyakan lagi. Sebab, kebijakan pemerintah selama ini tidak langsung mendongkrak ekonomi makro. Betul, pemerintah berhasil melakukan pengendalian fiskal. Tapi, Dradjad mengingatkan, kebijakan anggaran ditentukan bersama DPR.

Soal defisit anggaran yang kecil, Dradjad juga mengakuinya. Tapi, defisit bisa dikendalikan lantaran penyerapan anggaran yang amat rendah. Padahal, penyerapan anggaran yang rendah akan menimbulkan persoalan dalam penyerapan tenaga kerja. "Lalu, apa kerja pemerintah? Stabilisasi makro yang mana yang benar-benar dihasilkan oleh peran pemerintah?" kata Dradjad.

Tak hanya itu, tim ekonomi juga tidak bisa melindungi investor karena tak ada jaminan di bidang pertanahan, ketenagakerjaan, dan keamanan. Akibatnya, investor lari. Salah satu investor dari Timur Tengah yang akan ikut membangun monorail terpaksa hengkang karena tak ada jaminan. Alhasil, yang banyak masuk ke sini hanyalah investasi portofolio berjangka pendek.

Sudah begitu, pengembangan industri juga *belepotan*. Banyak industri yang sesak napas, terutama yang padat karya, seperti pertanian dan infrastruktur. Bahkan, dua kali digelar Infrastructure Summit, hasilnya tak menggembirakan.

Masalah lain yang membuat kinerja tim ekonomi terlihat melorot adalah stok beras yang berantakan sehingga membuat harga beras terus naik. Ketika Yudhoyono menjadi Presiden, harga beras masih di bawah Rp 3.000 per kg. Sekarang harganya sudah di atas Rp 5.000. Kelangkaan minyak tanah juga terjadi. Bahkan, "Kalau DPR tidak menolak, tarif dasar listrik bakal naik," tutur Dradjad.

KOORDINASI DIANGGAP BURUK

Buruknya performa tim ekonomi kemudian ditengarai akibat dari lemahnya koordinasi Boediono sebagai Menko. Menurut Iman Sugema (pengamat ekonomi), Boediono bukan orang yang taktis dan terbiasa mengurus sektor keuangan. Ini dapat dilihat dari kebijakan Boediono yang lebih berat ke sektor keuangan, sedangkan sektor riil tidak berjalan. Padahal, tidak selalu sektor riil berjalan linier dengan sektor keuangan.

Selain itu, Menko Ekonomi juga sulit berkoordinasi dengan bawahannya. Ini disebabkan menteri-menteri ekonomi memiliki latar belakang politik dan profesi yang beragam. Akibatnya, mereka susah diatur.

Nilai rendah tentu saja tak hanya untuk Menko Ekonomi Boediono. Menteri Keuangan Sri Mulyani juga dianggap jelek. Alasan Iman, kemampuan manajerial Sri Mulyani sangat rendah.



SUGIHARTO

TRUST/MULYANA

Hal itu dapat dilihat dari langkah Sri Mulyani dengan menandatangani proyek yang dibiayai Bank Dunia. "Dia itu tidak peduli negaranya akan bangkrut kalau meminjam uang secara tidak *prudent*," ungkap Iman.

Selain itu, kebijakan ekonomi—khususnya untuk anggaran—juga tidak pas bagi kondisi perekonomian Indonesia. Contohnya, pengurangan belanja modal pemerintah. Seharusnya, belanja modal pemerintah dinaikkan. Kenyataan, justru belanja rutin yang dinaikkan. Langkah ini dinilai Iman sangat kontraproduktif sehingga banyak departemen tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pembangunan.

Nilai rendah juga diberikan untuk Menteri Negara BUMN Sugiharto. Iman menilai Sugiharto tidak *well performed* dalam menjalankan tugasnya. Misalnya, lihat saja kebijakan restrukturisasi dan revitalisasi BUMN, yang sampai saat ini tidak ada hasilnya. Hal itu juga tecermin dalam penyelesaian masalah utang Garuda Indonesia.

Pernyataan senada juga datang dari Sandi Uno. Ketua Umum Hipmi ini meragukan performa Menteri Negara BUMN. Alasannya, semua program yang dikeluarkan Meneg BUMN selalu maju mundur. Kebijakannya juga tidak jelas. Kebijakan Sugiharto yang terus menyedot dividen perusahaan milik negara pun disoroti. "Kalau dividen perusahaan terus disedot untuk menambal APBN, kapan mau berkembang?" ujar Sandi.

Menteri lain yang juga dinilai kurang oke adalah Erman Suparno, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Ia dianggap tidak bisa mencari kompromi antara pengusaha, buruh, dan negara dalam UU Ketenagakerjaan. Beberapa pasalnya bahkan terlalu berat ke pengusaha, sedangkan sejumlah pasal lainnya terlalu berat ke pekerja. Seharusnya ada keseimbangan antara ketiganya agar tidak kontraproduktif.

Mari Pangestu, Menteri Perdagangan, juga dinilai mempunyai kinerja parah. Menurut Andi Rahmat, anggota DPR, Marie tak memiliki terobosan apa-apa. "Banyak pabrik tekstil yang mengambil bahan baku dari luar seperti Cina dan India, lalu dijahit di sini. Akibatnya, industri bahan baku lokal banyak yang tutup. Jadi, tidak ada penambahan jumlah tenaga kerja," tuturnya.

Yang bisa dibanggakan oleh Mari di akhir tahun ini hanyalah MoU dengan Jepang seputar pembebasan bea masuk produk Indonesia ke Negeri Sakura itu. Namun, MoU tersebut juga tak lepas dari kepentingan Jepang yang amat bernafsu mendapatkan gas dari Indonesia.

Bagaimana dengan Menteri Perindustrian, Fahmi Idris? Meskipun nilainya terbilang hancur, tapi ia masih dianggap lebih lumayan bila dibandingkan dengan anggota tim lainnya.

Sedangkan "gaung" Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dinilai "nyaris tidak terdengar". Menurut Dradjad, pembangunan infrastruktur yang dibiayai APBN tidak memiliki tero-

bosan. Forum infrastruktur juga tak dijadikan sebagai momentum kebangkitan di sektor pekerjaan umum.

Namun, yang dinilai paling parah dalam tim itu adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro. Meskipun dia menjadi menteri untuk empat presiden, masalah migas tak pernah beres. Contohnya lihat saja kelangkaan BBM yang sering terjadi, plus tidak adanya investasi baru di sektor migas sehingga produksi migas menjadi turun.

Hal senada juga diungkapkan oleh Kahlil Rowter. Analisis ini mengatakan bahwa Purnomo tidak bisa meningkatkan produksi migas saat harga sedang tinggi-tingginya. "Harga minyak sedang tinggi-tingginya dan cadangan banyak. Masak enggak ada yang mau berinvestasi? Tidak masuk akal," tutur Kahlil.

Kahlil dan Iman Sugema sependapat bahwa Purnomo hanya memiliki koneksi politik yang bagus. Makanya ia bisa bertahan lama.

MASIH ADA YANG BIRU

Tapi, tak semua menteri di bidang ekonomi dianggap punya nilai merah. Sandi Uno menilai, kepemimpinan Boediono menunjukkan arah yang membaik dari segi makro ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari inflasi yang stabil dan penurunan SBI. Sebelum dipegang Boediono, Sandi mengatakan tidak ada stabilitas ekonomi. Stabilitas makro ekonomi tersebut merupakan suatu jawaban yang ditunggu-tunggu pelaku usaha.

Selain itu, Boediono juga dinilai sebagai orang yang cepat tanggap dalam mengeluarkan kebijakan. Contohnya, ketika ia mengeluarkan program berupa matriks untuk mempercepat perekonomian. Hingga kini program itu sudah berjalan 50%.

Tak berbeda dengan Boediono, Sandi menilai Sri Mulyani juga terbilang oke. Hal itu terbukti dari penyusunan APBN yang dinilai para pelaku usaha cukup memberikan kestabilan ekono-

mi. Tapi, masih ada PR yang harus dikerjakan Sri Mulyani, yakni UU mengenai pajak, investasi, dan kecukupan. Padahal, UU tersebut sangat dinantikan para pelaku usaha—khususnya investor dari luar negeri yang mengharapkan kepastian hukum.

Sudah begitu, usia tim ekonomi pun baru dua tahun. Malah, sebagian ada yang baru bekerja selama setahun. "Tidak tepat bila mengukur performa tim ekonomi saat ini," tutur Ferry Lathuhin, *Chief Economist* Bank International Indonesia. Alasannya, tim ini adalah "tim cuci piring" yang harus membersihkan kotoran warisan Orde Baru yang begitu kompleks.

Selain itu, tim ini juga mewarisi masalah dari kenaikan harga BBM tahun lalu. Kenaikan tersebut sangat mengganggu kinerja mereka—kendati bila harga BBM tidak dinaikkan, rupiah bisa melonjak tinggi dan ongkos yang harus dibayar juga semakin tinggi.

Masalah lain yang mengganggu yakni tidak adanya investasi yang masuk, khususnya di bidang eksplorasi minyak sejak tahun 2000 hingga 2004. Investor tak berani masuk ke industri yang memiliki risiko tinggi akibat tidak adanya kepastian politik, pajak yang tidak bersahabat, dan banyak mafia di sektor minyak. "Untuk mengukur kinerja orang yang cuci piring, seharusnya lihat piringnya bersih atau tidak. Jangan tanya apakah piring tersebut bisa jadi emas atau berlian," papar Ferry.

SECARA MAKRO MEMANG SUDAH LEBIH BAIK

Lagi pula, lanjut Ferry, makro ekonomi Indonesia jelas menunjukkan bergerak ke arah yang lebih baik. Hal itu dapat dilihat dari *gross fix capital formation* atau investasi yang masuk dalam komponen GDP yang mengalami pertumbuhan *double digit*. Kenaikan serupa juga terjadi pada ekspor. Bahkan dari catatan yang dimiliki oleh Ferry, pertumbuhan investasi tersebut bisa mencapai 19% *year on year* sebelum kenaikan BBM.

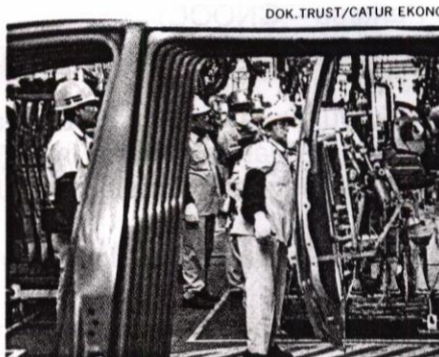
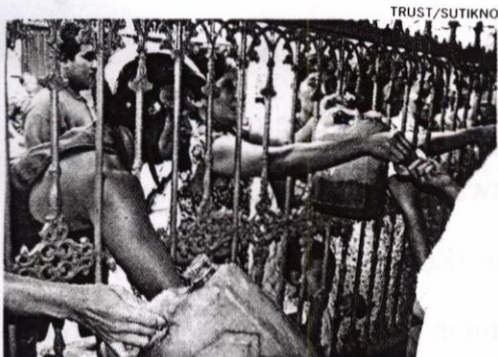
Setelah harga BBM dinaikkan plus ada kenaikan suku bunga

Pertumbuhan GDP dari berbagai sektor (2000=100): dalam triliun rupiah

Sektor	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. Pertanian	216,8	225,7	233,0	243,1	248,2	254,4	262,9	273,0
2. Pertambangan	167,7	168,2	169,9	168,4	160,1	162,6	166,7	171,6
3. Manufaktur	385,6	398,3	419,4	441,8	470,0	491,7	517,8	554,2
4. Elektronik, Gas, dan Air Bersih	8,4	9,1	9,9	10,4	10,9	11,6	12,4	13,3
5. Konstruksi	76,6	80,1	84,5	90,1	96,3	103,4	111,6	121,3
6. Perdagangan, Hotel, and Restoran	224,5	234,3	243,4	256,3	271,1	294,4	312,1	333,6
7. Transportasi dan Komunikasi	65,0	70,3	76,2	85,0	96,9	109,5	123,3	135,3
8. Jasa Keuangan, Penyewaan, Pelayanan	115,5	123,1	130,9	140,1	151,2	162,0	171,4	184,8
9. Jasa	129,8	134,0	139,0	144,4	152,1	160,0	169,5	175,9
Produk Domestik Bruto	1389,8	1443,0	1506,1	1579,6	1656,8	1749,5	1847,7	1963,0

PDB Riil (2000=100): dalam triliun rupiah

Pengeluaran	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
1. Konsumsi Rumah Tangga	856,8	886,7	920,7	956,6	1004,1	1043,8	1078,0	1119,7
2. Konsumsi Pemerintah	90,8	97,6	110,3	121,4	126,2	136,4	155,0	171,2
3. Investasi	275,9	293,8	307,6	310,8	354,6	389,8	402,0	457,2
4. Ekspor	569,5	573,2	566,2	612,6	680,5	739,0	818,2	892,0
5. Impor	423,3	441,0	422,3	433,8	545,0	612,3	659,8	713,1
Produk Domestik Bruto	1389,8	1443,0	1506,1	1579,6	1656,8	1749,5	1847,7	1963,0
6. Pasar Modal	20,1	32,7	23,5	12,0	36,4	52,8	54,3	35,9



PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN BELUM MAMPU DIATASI OLEH SEKTOR INDUSTRI YANG SEDANG BERJALAN

perbankan, ekonomi mengalami perlambatan pada kuartal pertama dan kedua tahun 2006. Kondisi tersebut sedikit berbeda dengan kuartal ketiga dan keempat yang mengalami perbaikan. Ini dapat dilihat dari 5,52% pertumbuhan GDP Indonesia. Ferry optimistis, pada akhir tahun 2006 ini GDP Indonesia akan sama dengan tahun sebelumnya atau pertumbuhan ekonominya minimal sebesar 5,5%. Pertumbuhan itu, menurut Ferry, cukup bagus bagi negara yang terkena dampak dari kenaikan harga BBM dan suku bunga.

Dengan melihat perbandingan tersebut, Ferry mengatakan bahwa siapa pun yang menjadi Menteri Ekonomi, dia pasti akan merasakan dampak yang kurang baik tadi. "Ini sudah menjadi *force major* bagi menteri yang berkuasa. Jadi, sulit untuk mengatakan bahwa kinerja mereka buruk meskipun kita juga tidak bisa mengatakan bahwa kinerja mereka *excellent*," ungkapnya.

Lalu, bagaimana komentar para menteri sendiri? Mari Pangestu enggan komentar. Menurutnya, kinerja Departemen Perdagangan tak bisa disampaikan dalam waktu singkat. Perlu wababan yang panjang. "Susah dijawab, karena faktor-faktornya banyak. Sekarang yang penting bagaimana kita mempertahankan pertumbuhan ekspor. Ini memerlukan peningkatan investasi dan perbaikan iklim investasi, serta penurunan ekonomi

biaya tinggi," tuturnya.

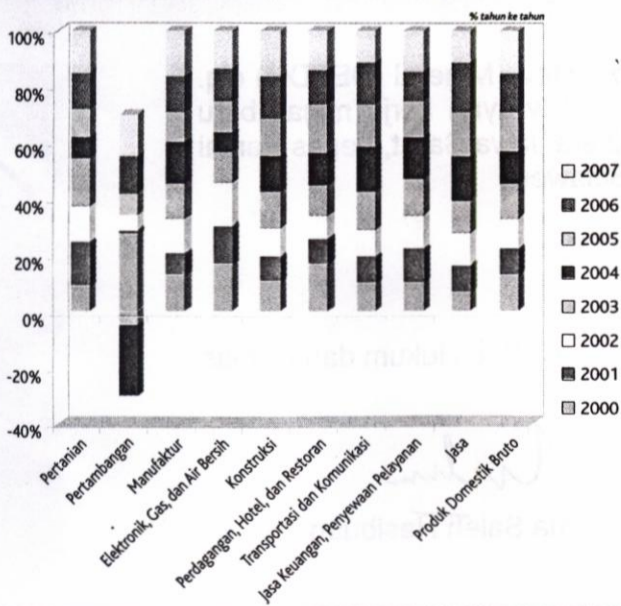
Sementara Djoko Kirmanto enggan dikatakan "nyaris tak terdengar". Menurutnya, pembangunan dari tahun 1970 hingga 1990 sudah cukup bagus. Sebelum tahun 2000, semua infrastruktur mengalami kerusakan yang begitu parah. Jalan sudah telanjur rusak berat dan irigasi sudah banyak yang tidak bisa dipakai. "Kondisinya ya seperti sekarang ini," katanya. Penyebabnya hanya satu: tidak ada dana untuk memperbaiki, apalagi membangun infrastruktur. Baru di tahun 2000-2003, kerusakan infrastruktur tadi berusaha diurai dengan *gerojokan* dana, meskipun mini. Akibatnya, masih ada irigasi maupun jalan yang masih bolong-bolong.

Nah, terkait pendanaan, untuk program kerja selama lima tahun ke depan diperlukan dana sebesar Rp 215 triliun. Dari jumlah itu, yang bisa dijual ke swasta hanya sekitar Rp 100 triliun, yakni untuk jalan tol dan air bersih. Akibatnya, selama lima tahun itu pemerintah harus menyiapkan dana sendiri—baik dari pinjaman luar negeri maupun APBN murni—sebesar Rp 115 triliun atau rata-rata Rp 22 triliun tiap tahunnya.

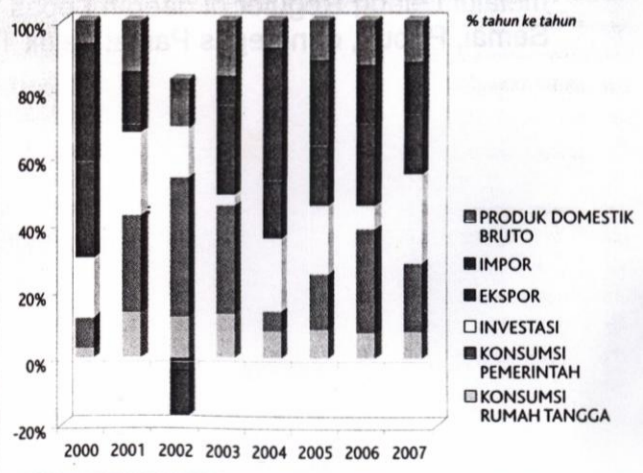
Namun kenyataannya tak seperti yang diharapkan Djoko. Di tahun pertama dia menjabat menteri, departemennya cuma kebagian Rp 13 triliun. Sementara di tahun kedua ada sedikit peningkatan menjadi Rp 19 triliun. "Tapi saya tidak bisa protes, karena kemampuan keuangan negara hanya segitu dan kami tidak mau merengek-rengok."

Jadi, akankah beberapa menteri di bidang ekonomi akan diganti? Hanya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tahu. □

Pertumbuhan PDB dari berbagai sektor



Pertumbuhan PDB



HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2006

EVALUASI POLITIK

Kinerja Menteri Lemah, Rakyat Kecewa

Pengantar Redaksi:

Menjelang akhir tahun 2006 sekaligus menyongsong tahun baru 2007, mulai Senin ini *Suara Karya* menurunkan serangkaian tulisan analisis tentang kehidupan sosial, ekonomi, hukum, dan politik. Tulisan disajikan di halaman satu, ditunjang tulisan per bidang di halaman dalam. Selamat mengikuti.

Di penghujung tahun 2006 ini, situasi politik nasional tiba-tiba menghangat menyusul pernyataan keras mantan Wapres Try Sutrisno dengan mengatas-

namakan Gerakan Kebangkitan Indonesia Raya (GKIR). Intinya, Try mengecam gaya dan manajemen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dia nilai lamban, ragu-ragu, dan tak memiliki prioritas serta konsep yang jelas selama dua tahun memerintah. Di beberapa media, GKIR bahkan meminta parlemen agar mencabut mandat SBY sebagai presiden.

Bagi mereka yang mengenal sosok dan kepribadian Try Sutrisno -- khususnya kalangan wartawan -- pernyataan itu jelas sangat mengagetkan. Selama memimpin berbagai jabatan, termasuk ketika sudah pensiun, Try sering diposisikan

sebagai "Bapak Bangsa".

Kata-kata "mari jaga persatuan dan kesatuan, mari kita duduk bersama" selalu terlontar dari mulut Try untuk mendinginkan suasana. Try Tak per-

**Try dan Hariman
Siregar telah menggerakkan kembali
roda dinamika demokrasi politik yang
lebih sehat.**

nah tampil dalam kesan sebagai lawan atau oposan bagi tokoh/-kelompok politik lain, apalagi terhadap pemerintahan yang sedang berkuasa. Baik itu di masa Presiden Habibie, Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur), hingga Presiden Megawati Soekarnoputri.

Karena itu, menjadi pertanyaan besar: bagaimana bisa terjadi perubahan orientasi sikap yang begitu mendasar, kalau tidak dibilang radikal, pada diri seorang Try Sutrisno sehingga tiba-tiba saja sangat kritis dalam menyikapi pemerintahan Presiden SBY? Patut dicatat di sini, Try dan Hariman Siregar telah menggerakkan kembali roda dinamika demo-

krasi politik yang lebih sehat.

Spekulasi paling kuat untuk menjawab perubahan sikap Try ini adalah karena dia sangat prihatin terhadap kondisi masyarakat sekarang ini. "Ini sebenarnya mewakili akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap lemahnya kinerja para menteri yang terakumulasi pada sikap dan keputusan Presiden SBY dalam menghadapi setiap persoalan yang menyangkut nasib rakyat," kata mantan Mendagri Syarwan Hamid kepada *Suara Karya*.

DARI HALAMAN 1

Kinerja Menteri Lemah, Rakyat Kecewa

Bila diperhatikan secara cermat, seperti tercermin dalam pemberitaan di media massa, memang semakin banyak saja tokoh yang menumpahkan kekecewaan terhadap kinerja pemerintahan SBY ini. Derasnya tuntutan agar SBY melakukan *reshuffle* kabinet bisa menjadi cermin membenaran terhadap kekecewaan itu.

Dua organisasi terbesar Muslim di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), sudah mendesak SBY agar merombak kabinet. Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN), dua partai besar yang dari awal mengklaim sebagai pendukung pemerintah, pun sudah lama menyuarakan itu.

Desakan untuk memperbaiki kinerja pemerintah lewat *reshuffle* muncul karena realitas kehidupan masyarakat semakin berat saja. Rakyat menghadapi lonjakan harga kebutuhan pokok, kelangkaan minyak tanah, pasokan listrik bagi industri dan rumah tangga tak terjamin, jumlah pengangguran membengkak, pertambahan lapangan kerja menyusut, investor asing gagal dijangir -- bahkan investor yang sudah ada pun kabur meninggalkan tumpukan utang bagi buruh, tak ada pula jaminan pendidikan dan kesehatan yang murah serta layak bagi warga masyarakat.

Rakyat yang kelaparan makan aking atau umbi, seolah sudah menjadi menu biasa dalam pemberitaan. Kenyataan itu tak lagi dipandang sebagai indikator kegagalan pemerintah dalam menyediakan kebutuhan pangan seperti diamanatkan konstitusi. Bukannya menyediakan pupuk dan benih murah serta memperbaiki atau membangun irigasi, pemerintah lebih senang jalan pintas; mengimpor beras.

Rakyat korban bencana di

Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Nias, DI Yogyakarta, Papua, dan terakhir korban luapan lumpur panas di Sidoarjo, Jatim, kecewa akibat terlunta-luntanya bantuan pemerintah. Korban flu burung juga terus berjatuh di banyak provinsi.

Pemberantasan korupsi ternyata tidak segarang pidato SBY saat kampanye dulu. "SBY dulu berjanji memimpin langsung perang melawan korupsi. Kini sudah dua tahun dia berkuasa, kita merasakan belum adanya perang (melawan korupsi) itu. Kita baru melihat pertempuran-pertempuran kecil," kata Ketua Umum PBNU Hasyim Muzadi.

Dalam pandangan pengamat politik Indria Samego, selama dua tahun memerintah, SBY lebih mementingkan pencitraan diri: berupaya menciptakan *image* yang baik melalui media massa. "SBY berusaha menampilkan diri sebagai tokoh pemimpin yang populer, dekat dengan rakyat, dan peduli terhadap kesediaan rakyat," kata Indria.

Pendapat senada juga disampaikan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Ma'arif. Dia menilai SBY dan menteri-menteri di Kabinet Indonesia Bersatu sebagai pemimpin hanya pandai berwacana, menjual tampang, tapi tidak berani mengambil keputusan.

Penanganan korban bencana alam bukannya didasarkan pada konsep dan program yang jelas untuk memulihkan kondisi psikis korban. SBY justru menjawabnya dengan mengundang media massa untuk menyoroti "keprihatinannya" yang ditunjukkan dengan memindahkan rapat kabinet ke daerah bencana, bermalam bersama korban bencana sambil bermain gitar, dan memperlihatkan muka prihatin saat menerima pengaduan dari masyarakat.

Keberhasilan SBY menci-

trakan diri sebagai tokoh pemimpin yang bekerja keras, santun, responsif, dan manusiawi menghasilkan persepsi bahwa SBY adalah presiden yang bijak dan tidak dapat disalahkan. Kegagalan pemerintahan adalah kegagalan menteri-menterinya.

Karena itu tak mengherankan bahwa saat ini menteri-menteri pun berlomba membangun citra diri di media massa -- sekaligus ingin menunjukkan kepada presiden bahwa mereka juga bekerja keras.

Bila politik pencitraan ini dibiarkan, tentu rakyat semakin menderita. Karena itu, peringatan keras yang dilontarkan tokoh sekaliber Try Sutrisno diharapkan membuat SBY sadar dengan segera kembali ke dunia nyata -- tidak terus terlena dalam politik pencitraan diri.

"Penyelesaian masalah bangsa bisa dilakukan bila SBY memprioritaskan persoalan-persoalan yang dianggapnya penting untuk diselesaikan lebih dulu. Yang paling mudah, prioritas itu dibangun berdasarkan janji-janjinya di masa kampanye dulu. Misalnya, pemberantasan korupsi dan kemiskinan. Fokus saja pada dua masalah itu," kata pengamat politik J Kristiadi.

SBY juga harus mengubah manajemen dirinya yang sudah dicap peragu, mau cari aman, dan tidak berani mengambil risiko. "Kita butuh pemimpin yang tegas dan berani. Itu yang tidak ada dalam diri SBY," kata Gus Dur.

Beraniakah SBY melakukan perubahan? Tahun 2007 akan menjadi pembuktian tentang itu. Bila tidak, tentu saja kita harus bersabar menunggu Pemilu 2009 dan menantikan pemimpin baru. Tapi jangan-jangan SBY justru kembali memimpin karena rakyat masih "termakan" oleh strategi pencitraannya. (Yudhiarman/Victor AS)

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HA Divestasi

Tak Salah tapi Tak Bagus

Penentuan patokan harga saham PGN berlangsung sangat seru. Tawaran dari pengusaha Malaysia akhirnya ditolak. Pemerintah mendapat hasil minim.

Agus S. Riyanto, Julianto, dan Teddy Unggik

BUKAN ini kali saja pemerintah melakukan penjualan saham BUMN. Tapi, tetap saja pemerintah terlihat begitu amatiran ketika menjual 5,13% sahamnya di PT Perusahaan Gas Negara (PGN), pekan silam. Sejumlah pelaku pasar pun sempat dibikin bingung oleh langkah Kementerian Negara BUMN yang cenderung angin-anginan.

Alkisah, penjualan saham pemerintah di PGN dilakukan untuk menutupi target pemasukan APBN senilai Rp 3,2 triliun dari privatisasi. Nyatanya, hingga bulan terakhir tahun ini, belum ada satu pun BUMN yang berhasil dijual pemerintah. Makanya saham PGN pun kemudian diajukan. Oktober lalu, Tim Seleksi Kantor Menneq BUMN menetapkan Bahana Securities, Danareksa Sekuritas, dan Credit Suisse sebagai penjamin emisi divestasi PGN.

Penetapan soal divestasi itu disetujui Menteri Negara BUMN, Sugiharto, November lalu. Nah, pada medio November itu, saham PGN di pasar modal sebenarnya sudah sempat menyentuh level Rp 13.600 per saham. Tapi, baru di awal Desember Sugiharto menyatakan bakal menjual saham PGN. Di BUMN tersebut, pemerintah masih memiliki 61% saham—39% lainnya sudah dilempar ke pasar lewat IPO (penawaran saham perdana) tahun 2003 silam. Kali ini, pemerintah akan menggunakan jalur pasar modal. Proses *bookbuilding* (pengumpulan minat awal) pun dilakukan hingga 14 Desember silam. Saham PGN lalu disuspensi di harga Rp 11.300

Namun, seorang pejabat Kementerian BUMN—yang dikenal amat dekat dengan Pak Menteri—punya inisiatif lain. Sumber TRUST di Kementerian BUMN mengisahkan, sang pejabat itu mencoba mencari investor

strategis yang mau membeli PGN dengan harga lebih mahal. Maka, ketemulah Dataran Mantin Sdn Bhd dari Malaysia, yang bergerak di bisnis properti dan tergabung dalam Kumpulan Langkawi Resources. Pemodal Malaysia itu lalu mengirimkan surat kepada Sugiharto tentang minatnya tersebut.

Sugiharto rupanya tertarik. Dua hari sebelum harga ditetapkan, Pak Menteri *janjian* ketemu dengan pemodal Malaysia tersebut. Tentu saja pertemuan itu diperantarai orang dekat Sugiharto tadi.

Namun, janji *ketemuan* tak bisa ditepati. Akhirnya digelar rapat di Kantor Menteri BUMN pada 14 Desember pagi. Ada Sugiharto, Said Didu (Sekretaris Menteri Negara BUMN), serta perwakilan dari PGN, Danareksa, dan Departemen Keuangan. Rapat ini tak menghasilkan apa-apa. Yang ada malah para wartawan yang terus mengorek-ngorek informasi. Itu sebabnya rapat tersebut lalu dipindahkan ke Hotel Sangrilla, Jakarta.

Malamnya, orang Malaysia itu datang. Ia sesumbar menawar di harga Rp 12.150 (Rp 850 lebih mahal dibanding harga sewaktu suspensi). Harapan membayang. Masalahnya, sang jiran tadi tak datang membawa uang. Uang itu baru akan dibayar setelah 45 hari berselang.

Manajemen Credit Suisses menolak pola itu karena dinilai tak sesuai prosedur. Sudah begitu, Dataran Mantin juga dianggap tak dikenal dan tidak mempunyai rekening pasti. Celakanya lagi, orang Dataran tadi juga meminta agar surat penawarannya ke Menteri Sugiharto, kemarin itu, dianggap tidak pernah ada.

Orias Petrus Moedak, Direktur Danareksa, juga cemas Dataran Mantin tak punya uang cukup untuk membeli PGN. "Coba bayangkan, setelah menunggu 45 hari, *eee...* uangnya malah *gak* ada. Kan repot," tuturnya.

Tapi, iming-iming pengusaha Malaysia itu telanjur membuat Sugiharto gamang. Sugiharto bahkan berniat mengundur penetapan harga hingga awal tahun-depan. Sejumlah nomor kemudian dihubungi Pak Menteri. Hingga akhirnya ia menyerah. Sugiharto menerima penjualan saham PGN sesuai harga pasar, yakni Rp 11.350 per saham (Rp 50 di atas harga suspensi). Kendati terlambat, keputusan Sugiharto memang tak bisa dianggap salah. "Penetapan itu terjadi pada Jumat jam dua pagi," ucap sumber tadi.

Dari situ, pemerintah memperoleh Rp 2,1 triliun. Kalangan analis jelas menilai pendapatan itu terlalu rendah. Sebuah prestasi yang tidak bagus, memang. □



TRUST/MULYANA

SUGIHARTO



TRUST/MAM WAHYDI

DIHARGAI TERLALU RENDAH

6

80

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 1

TAHUN 2006

Pemerintah Perlu Dorong BUMN Beli Saham Freeport

JAKARTA – Pemerintah diminta lebih serius mendorong divestasi 9,36% saham PT Freeport Indonesia (FI) kepada pihak nasional. Jika pemerintah tidak memiliki dana untuk membeli saham FI, saham itu dapat ditawarkan kepada BUMN, pemerintah daerah, BUMD, atau perusahaan swasta nasional.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Energi dan Sumber Daya Alam yang juga anggota Komisi VII DPR Dito Ganinduto kepada *Investor Daily* di Jakarta, pekan lalu. "Itu adalah hak pemerintah. Kalau pemerintah *nggak* punya duit, tawarkan saja kepada BUMN, pemda, atau BUMD. Jika tetap tidak ada yang sanggup beli, ya tawarkan ke perusahaan swasta nasional," ujarnya.

Hal senada diungkapkan pengamat pertambangan Benny Wahyu. Menurut dia, jika pemerintah, pemda, BUMN, dan perusahaan swasta nasional tak sanggup membeli 9,36% saham PT FI, pemerintah harus membuat mekanisme agar divestasi itu segera teralisasi. "Perusahaan swasta nasional semestinya diperbolehkan membeli hanya 2%, atau 3%, sesuai kemampuan. Tahun depan ditawarkan lagi sehingga pada akhirnya hak divestasi 9,36% itu bisa dieksekusi," kata dia.

Sebelumnya, PT FI menawarkan 9,36% sahamnya yang dulu dimiliki PT Indocopper Investama kepada perusahaan nasional

senilai US\$ 1 miliar atau Rp 9 triliun lebih. Harga itu 43% lebih mahal dari penawaran tahun lalu sebesar US\$ 700 juta.

Saat ini, komposisi pemegang saham FI adalah Pemerintah RI sebesar 9,36% dan Freeport McMoran 90,64%, termasuk di dalamnya saham eks Indocopper Investama yang dibelinya dari Grup Nusamba pada 1991.

Panja Freeport

Anggota Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy mengungkapkan, DPR sebenarnya telah membentuk Panja Freeport. Salah satu rekomendasi Panja adalah, pemerintah harus lebih proaktif membahas renegotiasi divestasi PT FI. "Ini tergantung kemauan pemerintah," kata dia.

Upaya peningkatan kepemilikan saham di PT FI, kata Tjatur, tidak harus melalui pembayaran tunai, tapi bisa dengan dicicil dari pembagian dividen. "Berbagai mekanisme bisa dipikirkan asal ada kemauan untuk mengambil hak divestasi tersebut," ungkapnya.

Dito Ganinduto mengatakan, pemerintah bisa mengambil hak divestasi perusahaan tambang sesuai kontrak karya, asalkan ada kemauan. Kalau anggaran terbatas, kata dia, Kementerian BUMN bisa menyiapkan BUMN untuk mengambil hak divestasi tersebut. "Mungkin saat ini BUMN belum memiliki dana, tetapi kalau disiapkan jauh-jauh hari, BUMN akan membuat aksi korporasi untuk mengeksekusi hak divestasi itu," kata dia.

Terkait aksi Pemerintah Bolivia yang berhasil menasionalisasi perusahaan tambang, Dito mengatakan, hal itu sulit dilakukan Indonesia karena investasi pertambangan di sini sangat minim. Di sisi lain, Indonesia membutuhkan energi yang cukup besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja. "Kita harus ingat, kompetisi untuk mendatangkan investasi itu sangat ketat," tegasnya.

Presiden Bolivia Evo Morales pada awal November 2006 mengumumkan keberhasilannya dalam menasionalisasi perusahaan migas yang telah dicanangkan sejak 1 Mei 2006. Beberapa perusahaan asing seperti Petrobas, Repsol YPF, Total SA, serta sejumlah perusahaan AS dan Eropa akhirnya bersedia menyerahkan konsesinya dan hanya duduk sebagai mitra di perusahaan tambang di Bolivia. Hasilnya, Bolivia dapat menikmati 82% penerimaan minyak dan gas, naik dari sebelumnya sebesar 50%.

Tujuan Morales melakukan kebijakan itu untuk memakmurkan rakyatnya. Bolivia adalah negara terkaya kedua dari sumber minyak dan gas di Amerika Latin, setelah Venezuela. Tetapi, rakyat Bolivia hidup miskin, bahkan masuk kelompok negara miskin di Amerika Latin, bahkan di dunia.

Presiden Brasil Fransisco 'Lula' da Silva juga berencana menasionalisasi perusahaan migas setelah menyadari bahwa kekayaan alam negerinya lebih banyak mengalir ke negeri asing. Gerakan serupa datang dari Presiden Iran Ahma-

dinejad dan Presiden Hugo Chavez di Venezuela.

Benny Wahyu mengatakan, pemerintah diminta memfasilitasi perusahaan swasta nasional yang berminat membeli saham PT FI karena itu hak pemerintah yang diserahkan kepada swasta nasional. Selanjutnya, pihak swasta dan PT FI bernegosiasi secara *business to business* untuk menentukan harga. "Perusahaan swasta bisa melakukan *due diligence* berapa harga wajar untuk membeli 9,36% saham PT FI," kata dia.

Terbebas Divestasi

Dirjen Mineral Batubara dan

Panas Bumi Simon Felix Sembiring ketika ditanya tentang kewajiban divestasi PT FI mengatakan, PT FI terbebas dari kewajiban menjual sahamnya ke pihak nasional (divestasi). Bahkan Freeport McMoran bisa mempunyai kepemilikan saham di FI hingga 100%. Simon mengatakan, pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena memang sesuai dengan Kontrak Karya (KK) terdapat klausul tersebut.

Dia mengungkapkan, meski pasal 24.2a disebutkan adanya kewajiban divestasi 2% per tahun setelah 10 tahun beroperasi, pasal 24.2d disebutkan apabila ada peraturan perundang-undangan

yang lebih menguntungkan di kemudian hari, maka aturan itulah yang berlaku (*lex specialist*). Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah (PP) 20/1994 yang didukung surat BKPM No.415/A.6/1997 menyebutkan dibolehkannya kepemilikan asing hingga 100%.

Menurut Simon, dengan adanya peraturan tersebut, program divestasi tidak berlaku bagi FI. Meski begitu, sesuai kesepakatan antara pemerintah RI dan Freeport McMoran pada 2004, 9,36% saham Indocopper Investama akan ditawarkan ke pihak nasional. FI kemudian menawarkan ke peme-

rintah pusat. Namun, pemerintah pusat tidak mau membeli karena tidak memiliki dana.

Saat ini, kata Simon, pihak FI telah menawarkan 9,36% saham tersebut ke Pemerintah Papua. "Jadi sesuai peraturan divestasi, jika pemerintah pusat tidak mau beli, ya ditawarkan ke pemerintah daerah," katanya. Dia mengatakan, sebelumnya Gubernur Papua Almarhum Salossa menyatakan kesanggupannya untuk membeli saham tersebut. Namun dengan bergantinya pimpinan daerah, kebijakan berubah.

Simon mengatakan, jika pemda tidak sanggup membeli, FI harus menawarkan ke pihak swasta nasional. "Harus ditawarkan ke swasta, tapi harus nasional. Jadi bisa saja

itu nama asing, asalkan pemiliknya orang Indonesia," jelasnya.

Juru bicara FI Mindo Pangaribuan mengakui, sejak ditawarkan pada 2004, hingga saat ini belum ada perusahaan nasional yang secara resmi menyampaikan minat untuk membeli 9,36% saham tersebut. "Kami belum menerima tawaran resmi dari pihak mana pun," katanya. Dia menduga, pihak nasional tidak berminat karena harganya mahal.

Ketika terjadi pembaruan KK tahap II tahun 1991, 9,36% saham Freeport dibeli oleh grup Bakrie melalui PT Indocopper Investama dengan harga US\$ 213 juta. Namun, pada 1992, Freeport membeli kembali 51% saham itu senilai US\$ 212 juta. Pada 1997, Bakrie juga

melepas 49% saham miliknya di Indocopper kepada PT Nusamba Mineral Industri milik Bob Hasan senilai US\$ 302,7 juta. Tahun 2002, Bob Hasan menjual semua sahamnya di Indocopper kepada Freeport.

Menurut Mindo Pangaribuan, hingga akhir 2005, tambang Freeport diperkirakan memiliki cadangan 2,8 miliar ton. Setiap hari, produksi rata-rata konsentrat Freeport mencapai 7.000 ton, yang setiap tonnya mengandung 300 kilogram tembaga, 30 gram emas, 50 gram perak, dan jenis logam lain. Pada 2005, Freeport menyektor pajak, dividen, dan royalti ke pemerintah sebesar US\$ 1,2 miliar atau sekitar Rp 11 triliun.

(ari/lim/es)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

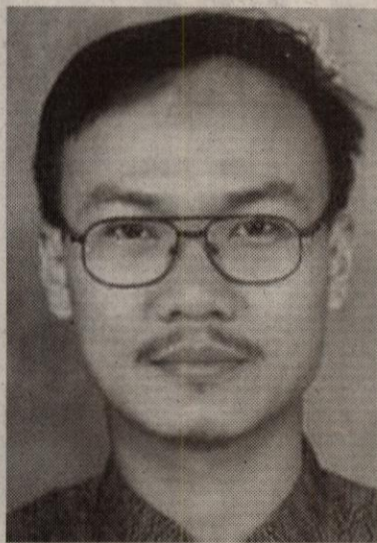
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN: 24

TAHUN 2006

Paradoks Indikator Makro dan Kesejahteraan

Oleh HADY SUTJIPTO



PERBAIKAN beberapa indikator makroekonomi nasional diakhir tahun 2006, membuat optimis pemerintah dalam melihat prospek perekonomian Indonesia pada tahun 2007. Bahkan sejumlah ekonom yang tergabung dalam Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyatakan pada 2007 dapat menjadi titik balik kebangkitan perekonomian nasional untuk mengakhiri dasawarsa krisis ekonomi Indonesia ("PR" 12/12/06)

KEBERHASILAN makroekonomi tersebut tercermin antara lain: *Pertama*, tingkat inflasi yang terus menurun, secara keseluruhan inflasi IHK 2006 diperkirakan akan berada sekira 6% atau di bawah sasaran yang ditetapkan sebesar 8%. *Kedua*, penurunan *BI rate* selama tahun 2006 terjadi delapan kali sebesar 300 basis poin dari 12,75% menjadi 9,75%; dan *ketiga*, nilai tukar rupiah bergerak stabil dengan kecenderungan menguat hingga Desember Rp 9.000- / dolar. Keberhasilan lain yang dicapai adalah indeks harga saham di Bursa Efek Jakarta yang menembus level 1.700 serta mencatat kinerja terbaik ketiga di Asia, dan nilai ekspor Indonesia yang terus meningkat.

Dari sisi fiskal, beban APBN agak berkurang dari pos pembayaran utang luar negeri dan subsidi BBM. Pemerintah telah membayar lunas seluruh utang Indonesia kepada Dana Moneter Internasional (IMF) lebih cepat daripada rencana pada awal 2007. Pembayaran utang dua tahap, bulan Juni lalu sebesar 7,51 miliar dolar dan bulan Oktober sebesar 3,2 miliar dolar. Penghematan pemerintah didapat juga dari subsidi BBM akibat kenaikan harga BBM dalam negeri pada akhir tahun 2005. Hal ini pun berimbas pada tingkat defisit anggaran yang juga mengalami penurunan menjadi 1,2% pada 2006. Keluasan ini diharapkan pemerintah fokus pada alokasi dana untuk pembangunan.

Ketimpangan indikator

Di balik prestasi kinerja makroekonomi yang membaik, ternyata belum mampu meningkatkan kinerja sektor riil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, terutama kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan. Ini ditandai dengan masih stagnasinya sektor riil, tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin yang masih tinggi.

Penurunan *BI rate* dipandang sebagai sinyal positif yang akan mendorong bergeraknya sektor riil dalam memperoleh pembiayaan yang semakin murah. Namun respons perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit dapat memakan waktu tiga bulan dan efeknya pada sektor riil dapat memakan waktu enam bulan. Suku bunga saat ini berkisar 14%-16%. Kalangan pengusaha menginginkan penurunan bunga 10%-13%.

Dana yang parkir di SBI sebesar Rp 200 triliun, BI harus menyedia-

kan Rp 23 triliun untuk bunga. Padahal, jika dana tersebut disalurkan kepada sektor riil dan pembangunan infrastruktur, efek *multiplier*-nya sangat besar. Hal ini menggambarkan kebijakan moneter memberikan insentif yang lebih menguntungkan untuk menyimpan uang di bank daripada masuk ke sektor produksi di sektor riil. Gambaran lain masih lemahnya fungsi intermediasi perbankan nasional dalam penyaluran kredit ke sektor riil.

Ketidakkonsistenan pemerintah untuk mengembangkan sektor riil nampak lagi ketika PT Pertamina (Persero) per 12 Desember 2006 kembali menaikkan harga elpiji yang

”

Seandainya pemerintah masih menggunakan indikator makroekonomi dan kebijakannya sebagai sebuah keberhasilan pembangunan, maka yang terjadi sesungguhnya menggambarkan pembangunan yang semu yang tidak memberikan perubahan besar terhadap kesejahteraan rakyat

”

diperuntukkan bagi kalangan industri sebesar 10,83%. Harga elpiji industri yang dijual secara curah (*bulk*) naik dari Rp 5.280,00 per kg menjadi Rp 5.852,00 per kg. Sebelumnya, Pertamina telah menaikkan harga elpiji industri pada 11 September 2006 dari Rp 4.250,00/kg menjadi Rp 5.280,00/kg. Pengguna elpiji *bulk* adalah sektor industri dan komersial skala menengah hingga besar seperti pabrik kaca, gelas, industri keramik, dan hotel-restoran. Keputusan Pertamina menaikkan harga elpiji untuk industri tentunya menambah beban produksi industri akan semakin berat.

Sementara dari sisi APBN, pemerintah memperkirakan anggaran belanja modal dan barang yang gagal diserap hingga akhir tahun mencapai Rp 37,73 triliun atau 30 persen dari target APBN-P 2006. Akibatnya pembiayaan proyek yang terlambat dilaksanakan akan terhenti dan menunggu anggaran APBN 2007. Dampaknya

upaya mengembangkan sektor riil yang berkaitan dengan pembangunan infrastruktur juga terhambat.

Suatu yang mengejutkan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang adanya aliran uang ke daerah yang diselewengkan, bahkan menjurus pada tindak korupsi. Dalam laporan Hasil Pemeriksaan Semester I-2006, BPK menyebutkan temuan pengelolaan uang daerah yang bermasalah mencapai Rp 12,04 triliun ditambah 449.500 dolar AS. Anggaran belanja negara yang diberikan ke daerah berbentuk Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, hingga Dana Penyesuaian.

Melihat kondisi umum ketenagakerjaan, terlihat tidak adanya korelasi positif antara pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja. Secara teoritis, jika perekonomian mengalami pertumbuhan, maka penyerapan tenaga kerja atau permintaan tenaga kerja akan meningkat perkembangan lima tahun terakhir menunjukkan bahwa peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan pengurangan pengangguran. Data pengangguran terbuka yang terus meningkat dari 10,3 juta (9,9%) pada Agustus 2004 menjadi 11,1 juta (10,4%) pada Februari 2006 dan November 2006 naik menjadi 11,9 juta (11,2%)

Demikian jumlah penduduk miskin Indonesia bertambah dari 36,2 juta (2004) menjadi 39,05 juta (2006). Laporan Bank Dunia (2006) yang mengungkapkan adanya hampir 109 juta jiwa rakyat yang hidup dengan penghasilan di bawah 2 dolar per hari atau sekira Rp 18.000 per hari, seharusnya menyadarkan elit bangsa. Banyak program yang sudah dilakukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan.

Lemahnya sinergitas kebijakan dan program antarpemerintah, sektor, dan lembaga, semuanya sama-sama kerja tetapi tidak optimal dalam kerja sama. Sehingga dalam implementasinya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak sinkronnya kenaikan pendapatan per kapita dengan banyaknya penduduk miskin menunjukkan ada sesuatu konsep yang keliru. Jelas, dengan data-data semacam ini kita sulit untuk mengatakan bahwa kesejahteraan rakyat saat ini sudah membaik

Implikasi kebijakan

Melihat pada gambaran di atas, maka pemerintah harus fokus dalam penciptaan pertumbuhan ekonomi yang dapat menciptakan kesempatan kerja yang memadai, sekaligus menurunkan angka kemiskinan. Sta-

bilitas makroekonomi saat ini merupakan suatu kondisi yang dibutuhkan tetapi belum merupakan kondisi yang cukup dalam rangka peningkatan kesempatan kerja dan penurunan kemiskinan.

Dalam rangka penciptaan kesempatan kerja, pemerintah perlu berhati-hati dalam menerima investasi. Investasi yang dibutuhkan adalah investasi yang berbasis pada sumber daya ekonomi yang ada di kita dan memberikan nilai tambah yang besar dalam penciptaan kesempatan kerja. Diperlukan juga revitalisasi pada sektor pertanian, karena sektor inilah penyumbang pengangguran tertinggi. Mendorong sektor nonformal seperti UMKM dan PKL ke dalam sektor formal.

Kelangkaan modal yang mudah untuk diakses bagi penduduk miskin maupun pengusaha mikro dan kecil-menengah (UMKM), kurangnya infrastruktur fisik dan sosial, kurangnya akses terhadap pelayanan dan informasi serta beberapa faktor sosial budaya masyarakat adalah faktor-faktor penting yang membatasi masyarakat miskin maupun masyarakat lainnya yang bergerak dalam sektor usaha mikro dan kecil menengah (UMKM) untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan sosial.

Langkah-langkah tersebut merupakan landasan yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja formal yang seluas-luasnya dan mendukung upaya perpindahan pekerja dari pekerjaan dengan produktivitas rendah ke pekerjaan dengan produktivitas lebih tinggi. Hal ini perlu didukung oleh regulasi pasar kerja dan persaingan usaha.

Selanjutnya, pemerintah perlu serius melakukan upaya peningkatan kualitas SDM. Biaya pendidikan dan kesehatan dirasakan mahal oleh rakyat di saat ini investasi SDM adalah mahal dan lama. Belajarlah dari Malaysia agar SDM kita bisa bersaing.

Seandainya pemerintah masih menggunakan indikator makroekonomi dan kebijakannya sebagai sebuah keberhasilan pembangunan, maka yang terjadi sesungguhnya menggambarkan pembangunan yang semu yang tidak memberikan perubahan besar terhadap kesejahteraan rakyat.***

Penulis, Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi FE Universitas Islam Bandung (Unisba) dan Lajnah Maslahiyah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2006

Pemerintah, Kunci Divestasi Freeport

Saham PT Freeport Indonesia (Freeport) sebesar 9,36% eks milik PT Indocopper Investama kembali ditawarkan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, perusahaan swasta, badan usaha milik negara (BUMN), dan badan usaha milik daerah (BUMD) tidak berani membeli saham Freeport jika pemerintah berdiam diri. Kuncinya ada di tangan pemerintah. Jika pemerintah tidak berinisiatif, divestasi saham Freeport bisa dibatalkan dan perusahaan asing asal AS, Freeport-McMoRan, dibiarkan menikmati sebanyak-banyaknya kekayaan alam Papua.

Seperti hendak meledek pemerintah dan perusahaan Indonesia, Freeport pekan silam kembali menawarkan 9,39% saham dengan harga US\$ 1 miliar atau Rp 9 triliun lebih. Harga saham perusahaan tambang tembaga dan emas yang beroperasi di Mimika, Papua, ini terus meningkat signifikan setiap tahun. Setahun yang lalu, 9,39% harga saham Freeport ditawarkan pada harga US\$ 700 juta.

Bisa dipastikan, divestasi saham Freeport tahun ini gagal. Tahun 2006 tinggal beberapa hari lagi. Kemungkinan besar, harga saham Freeport tahun depan akan lebih mahal lagi mengikuti harga komoditas pertambangan di pasar internasional yang terus meroket.

Mengapa pemerintah memegang peran kunci dan kenapa saham Freeport layak dibeli? Pemerintah memang memainkan peran kunci karena Freeport sesungguhnya tidak wajib mendivestasikan sahamnya. Divestasi 9,36% saham Freeport hanya berdasarkan perjanjian antara pemerintah dan Freeport tahun 2004.

Divestasi saham perusahaan pertambangan di Indonesia merujuk pada Kontrak Karya (KK) II 1991. Pada pasal 24 2(a) disebutkan, setiap perusahaan asing yang menekan KK wajib mendivestasikan saham kepada pihak Indonesia secara bertahap hingga 51%. Tapi, pada pasal 24 2(d) dinyatakan, apabila di kemudian hari ada peraturan perundang-undangan yang lebih menguntungkan perusahaan pertambangan, peraturan perundang-undangan itulah yang berlaku (*lex specialis*).

Pemerintah kemudian menerbitkan PP No 20/1994 dan surat BKPM No 415/A.6/1997 yang membolehkan kepemilikan asing hingga 100%. Dengan ketentuan ini, program divestasi tidak berlaku bagi perusahaan pertambangan, termasuk Freeport. Satu-satunya, yang membuat Freeport wajib melakukan divestasi sahamnya adalah kesepakatannya dengan pemerintah Indonesia tahun 2004.

Pemerintah sejak beberapa tahun silam sudah menyatakan ketidaksanggupan membeli saham Freeport karena keterbatasan dana. Namun, selama pemerintah tidak mendorong, mi-

nimal mempersilakan pihak lain untuk membeli, saham Freeport yang ditawarkan takkan pernah bisa dieksekusi.

Ketika melakukan divestasi, 9,36% saham Freeport dijual kepada pemerintah Indonesia dan 9,36% lainnya kepada Indocopper Investama, sebuah perusahaan yang dimiliki PT Bakrie Copperindo Investment (BCI). PT BCI kemudian melepaskan semua kepemilikannya di Indocopper kepada PT Nusamba Mineral Industri (Nusamba), perusahaan yang dimiliki Muhammad (Bob) Hassan.

Saham Indocopper di Freeport kemudian kembali jatuh ke tangan Freeport-McMoRan sebagai kompensasi utang Nusamba yang dijaminnya. Nusamba tidak mampu memenuhi kewajibannya, sehingga 9,36% sahamnya dieksekusi Freeport-McMoRan sebagai kompensasi. Dengan demikian, kepemilikan saham Freeport-McMoRan, perusahaan publik asal AS yang tercatat di NYSE, kembali meningkat menjadi 90,64%.

Banyak perusahaan Indonesia yang sudah menyatakan minat untuk membeli 9,36% saham Freeport. Tahun lalu, PT Aneka Tambang Tbk malah bersedia memborong sekaligus saham Freeport milik pemerintah. Peminat lain adalah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang sudah berhasil mengangandeng sejumlah perusahaan investasi. Tapi, proses divestasi saham Freeport tak jelas kelanjutannya hingga muncul lagi penawaran tahun ini.

Freeport adalah salah satu perusahaan pertambangan terbesar di dunia cadangan tembaga 40,7 miliar pon dan emas 46,6 juta ons. Pada tahun 2005, kontribusi Freeport sekitar US\$ 1 miliar, atau 25% dari pendapatan Freeport-McMoRan, perusahaan induknya. Sejumlah pakar pertambangan mengatakan, jika tidak ada rekayasa keuangan, pendapatan perusahaan pertambangan akan lebih besar.

Salah satu bentuk rekayasa adalah penggelembungan kewajiban. Dana pinjaman berasal dari grup, sehingga bunga dan cicilan kembali masuk ke grup. Rekayasa inilah yang menjadi salah satu faktor yang perusahaan Indonesia enggan membeli saham perusahaan pertambangan asing.

Kita mengharapkan pemerintah segera mendorong BUMN yang berminat dan pemda Papua lewat BUMD-nya untuk membeli saham Freeport. Pertama, harga saham Freeport harus dihitung kembali secara *fair*. Kedua, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada penggelembungan kewajiban yang berasal dari perusahaan keuangan segrup. Ketiga, pembayaran tak mesti 100 tunai. Sebagian harga saham Freeport bisa dibayar dengan dividen.

Tidak ada kesulitan apa pun dengan sumber pendanaan. Jika ada keuntungan besar, kreditor akan siap mendukung.

Bola ada di tangan pemerintah. Jika memang menghendaki agar BUMN dan pemda setempat ikut menikmati keuntungan perusahaan pertambangan, pemerintah bisa menerbitkan lagi PP yang menegaskan kewajiban divestasi bagi perusahaan pertambangan asing. □

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN: 74

TAHUN 2006

Medco rambah bisnis perikanan

Oleh ASEP MH. MULYANA
Bisnis Indonesia

CIAMIS: Grup Medco yang selama ini dikenal sebagai perusahaan perminyakan memasuki bisnis perikanan dengan mendirikan Indo Thai Fisher.

Arifin Panigoro, pendiri Grup Medco, menjelaskan pihaknya sudah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan dari Thailand untuk mendirikan perusahaan patungan di bidang penangkapan ikan.

"Investasinya US\$5 juta dengan komposisi saham masing-masing 50%," ujarnya sesuai peresmian bangunan KUD Purbasari, Ciamis, bantuan Grup Medco Group oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Freddy Numberi, pekan lalu.

Menteri pada kesempatan itu juga meresmikan tempat pelelangan ikan (TPI) bantuan PT Telkom.

Menurut Arifin, pada tahap awal perusahaan itu difokuskan pada penangkapan ikan, karena perusahaan mitra memiliki kapal penangkapan yang besar. "Dalam kesepakatan kerja sama, kami minta perusahaan Thailand itu juga membantu para nelayan tradisional."

Secara bertahap, kata dia, perusahaan patungan akan dikembangkan pada pengolahan ikan dan kini menjajaki lokasi di Padang.

"Pantai selatan Jabar juga berpotensi menjadi lokasi pengolahan ikan. Tapi lihat-lihat dulu lah. Yang penting perusahaan ini jalan dulu."

Arifin mengemukakan pihaknya banyak bertanya pada perusahaan yang sudah berpengalaman sebelum masuk ke bisnis perikanan.

Medco memutuskan ma-

suk ke bisnis ini karena potensi sektor perikanan yang sangat besar lebih banyak digarap asing dan tingginya kasus pencurian ikan, sementara jumlah perusahaan nasional masih kurang. "Kami serius menggarap sektor ini dengan menyetorkan uang dan setor risiko. Kalau sungguh-sungguh, *Insy Allah* berhasil."

Menteri Freddy Numbery menyatakan sejumlah investor China dan Thailand siap investasi US\$5 juta-US\$10 juta di sektor perikanan. Mereka disyaratkan bermitra dengan perusahaan nasional.

Untuk itu, dia meminta pemda mempermudah perizinan dan tidak melakukan berbagai pungutan. "Kalau bisa biarkan perusahaannya jalan dulu. Setelah beberapa tahun baru dikenakan pajak." (asep.mulyana@bisnis.co.id)

84

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 14

TAHUN 2006

LUMPUR SIDOARJO

Tol di Atas Jalan Raya Porong Dibongkar Besok

SIDOARJO (Media): Jalan tol yang melintas di atas Jalan Raya Porong, Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim) besok akan dibongkar setelah Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur menyatakan jalan tol itu membahayakan.

Menurut Pimpinan Proyek Pembongkaran Jalan Zainal Arifin, jalan itu mengalami keretakan setelah tidak dimanfaatkan lagi sejak jalan tol ditutup. Disebutkan, dalam satu minggu jembatan mengalami keretakan hingga 8 sentimeter dan dikhawatirkan ambruk

sehingga mengganggu lalu lintas Jalan Raya Porong.

"Sekarang sedang dilakukan persiapan untuk memudahkan proses pembongkaran," kata Zainal di Sidoarjo, kemarin.

Persiapan itu antara lain telah menempatkan gergaji beton, serta crane berbobot 50 ton dan 80 ton.

Sedangkan Kepala Bagian Pengendali Proyek PT Jasa Marga Cabang Surabaya Gempol M Dono mengatakan, untuk membongkar jembatan diperkirakan butuh waktu tiga pekan termasuk tiga

hari pembuatan jalan alternatif di sisi barat Raya Porong.

Sementara itu, semburan lumpur bercampur minyak yang sempat mencemaskan warga Kelurahan Kenaliasam Bawah, Kecamatan Kotabaru, Jambi, berhasil disumbat petugas Pertamina menggunakan cairan semen. Untuk menjaga semburan susulan, pihak Pertamina juga sudah membuat bak penampungan ukuran 1x2 meter.

Menurut staf humas Pertamina Jambi Umar, penyebab semburan lumpur itu masih dalam pene-

litian. Pertamina maupun Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Jambi sudah mengambil contoh lumpur untuk diperiksa di laboratorium.

Sedangkan puluhan keluarga di RT 01, Kelurahan Kenaliasam Bawah yang sempat khawatir munculnya semburan lumpur, kemarin, sudah bisa tenang kembali. "Alhamdulillah, mereka cepat bertindak. Cemas kami jadi hilang," ujar Mida, warga yang tinggal di dekat semburan lumpur itu.

(FL/SL/N-3)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI


GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN: B12

TAHUN 2006

Persediaan nikel di London turun

 LONDON: Harga nikel meningkat untuk pertama kalinya dalam enam sesi perdagangan, setelah terjadi penurunan pasokan. Persediaan logam yang diawasi London Metal Exchange turun 3,5% menjadi 7.092 ton. Konsumen nikel pada tahun ini diprediksi akan menyerap 25.800 ton. "Aktivitas perdagangan di pasar cukup ketat karena minimnya pasokan," kata Michael Widmer, analis logam Calyon, London.

Harga nikel untuk pengiriman tiga bulanan di London naik US\$1.002 atau 3,1% menjadi US\$33.302 per ton. Nikel sempat mencatat rekor harga di level US\$34.950 per ton pada 15 Desember. (BLOOMBERG/ADN)

86

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 4

TAHUN 2006

Pemerintah Didesak Tetapkan Lumpur Lapindo Jadi Bencana Nasional

MUSIBAH semburan lumpur panas Lapindo yang semula hanya berkubang di Sidoarjo (Jawa Timur) mulai masuk ke daerah Jember. Para ahli geologi berpendapat, semburan itu mustahil dihentikan. Karena itu, pemerintah didesak menyatakan semburan lumpur panas Sidoarjo sebagai bencana alam nasional.

"Pemerintah perlu menjelaskan keadaan sesungguhnya yang terjadi di Sidoarjo kepada DPR. Karena penetapan semburan lumpur panas Sidoarjo sebagai bencana nasional memiliki konsekuensi pemerintah terlibat sepenuhnya dalam penanganannya," kata Sekjen Partai Persatuan Daerah (PPD) Adhie M Massardi didampingi sejumlah pengurus Gerakan Pemuda Daerah (Gapura) di Jakarta, kemarin.

Pemerintah, lanjutnya, mesti melindungi pengusaha nasional yang memiliki tanggung jawab seperti kelompok usaha Bakrie. "Dalam situasi sulit seperti ini, pengusaha nasional jangan dipaksakan untuk menanggung di luar kemampuannya. Karena situasinya memang sudah berbeda, mereka juga menjadi korban dari terjadinya sebuah bencana nasional," katanya.

Adhie meminta pemerintah tidak perlu takut disebutkan melindungi kelompok usaha Bakrie karena menetapkan bencana Lapindo sebagai bencana nasional. "Kita juga minta semua pihak menghentikan berbagai polemik tentang siapa yang salah dalam bencana ini, karena hanya membuat situasi makin tidak menentu dan kontraproduktif," ujarnya.

Sedangkan Ketua Majelis Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Hendarji, setuju jika pemerintah segera menetapkan bencana di Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai bencana nasional. Di mana langkah ini harus dilakukan sehingga penanganan bisa lebih efektif. Dia juga meminta semua kalangan, baik DPR, pemerintah, LSM, atau elemen lainnya untuk bersama-sama membantu dalam menanggulangi semburan lumpur panas di Sidoarjo, sehingga kondisi perekonomian pun bisa kembali pulih. ■ FN

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN: 22

TAHUN 2006

2007, Nasib Lingkungan Indonesia Makin Buruk

JAKARTA — Rendahnya kepedulian pemerintah terhadap persoalan lingkungan membuat kondisi lingkungan hidup Indonesia terancam memburuk pada tahun 2007. Menurut Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Chalid Muhammad, jika tidak segera dilakukan intervensi, diperkirakan kerusakan alam di tahun 2007 akan semakin parah.

Walhi memprediksi bahwa tingkat kerusakan ekologi tahun depan akan mencapai 20 hingga 25 persen dari jumlah yang sekarang. Jika tahun ini sudah terjadi 320 bencana ekologis selama Januari hingga Desember 2006, diperkirakan tahun depan akan naik menjadi 500 bencana.

"Ini angka yang sangat mengherikan," katanya saat memberikan paparan pada acara refleksi akhir tahun bertajuk 'Lingkungan Hidup dan Orientasi Politik Indonesia 2007', di Jakarta, pekan lalu.

Parahnya, kata Chalid, dengan situasi lingkungan yang makin memburuk, pemerintah tidak melakukan respons yang seharusnya. "Respons pemerintah hanya alakadarnya dan itu pun tidak berorientasi pada pemecahan

akar masalah," jelasnya.

Ia mencontohkan, kasus kebakaran hutan yang mencapai angka 3,4 juta hektare per tahunnya. Menurut Chalid, tingginya angka ini diakibatkan oleh *gap* akibat permintaan kayu yang sangat tinggi. Akibatnya, praktik *illegal logging* makin merajalela. Namun, bukannya memotong masalah di akar, jelas Chalid, pemerintah justru hanya memburu para pembalak liar. "Ini kan tidak menyelesaikan masalah, justru menunjukkan respons pemerintah yang salah kaprah," katanya.

2007 masih gelap

Sementara itu, pengamat hukum yang juga Dewan Pengurus Harian ICEL, Mas Achmad Santosa menyatakan bahwa harapan ada keseriusan penanganan masalah lingkungan hidup di 2007 masih belum akan ada perubahan. "Masih gelap," katanya. Pasalnya, kata Santosa, hingga kini nyaris tidak ada partai politik di pemerintahan yang berorientasi lingkungan hidup. "Bahkan, tidak partai besar sekalipun," katanya.

Dua partai, yaitu PPP dan PKS yang pada awal Pemilu mengusung program ling-

kungan hidup pun, seakan lupa pada janji politik mereka. "Ini yang harus kita tagih," lanjutnya. Meski menilai akan sangat sulit, namun Santosa berharap kedua partai ini akan memberikan warna terutama dalam membangun pemahaman akan pentingnya isu ini di DPR.

Pernyataan Santosa ini diperkuat oleh Catur Supto Edi, anggota DPR RI dari Komisi 7. Menurutnya, dari sisi program dan anggaran, apa yang dilakukan pemerintahan SBY saat ini tidak ada bedanya dengan apa yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. "Tidak ada perubahan," katanya.

Bahkan, lanjut Catur, pada tahun 2006 dan 2007 mendatang, pemerintah sama sekali tidak memiliki program dan anggaran khusus untuk persoalan lingkungan hidup di Tanah Air. Ia juga menilai Kementerian Lingkungan Hidup sebagai pihak yang seharusnya mengurus persoalan ini justru tidak memiliki kekuatan sama sekali. "Saya justru kasihan karena peran KLH termarginalkan dalam sistem yang besar ini," katanya.

Karena itu, Catur menilai di tahun mendatang, ia tidak

terlalu banyak berharap akan adanya perubahan dalam persoalan lingkungan hidup di Tanah Air. Menurutnya, tidak adanya program dan anggaran khusus menjadi refleksi akan seperti apa nasib lingkungan di Indonesia tahun depan.

Senada dengan Catur, Santosa menilai hingga saat ini pemerintah belum berorientasi pada rakyat. "Selama ini orientasinya selalu pertumbuhan ekonomi, akibatnya masalah sosial, kepentingan rakyat, dan lingkungan diabaikan," katanya. Jika ini terjadi, fenomena kerusakan alam akan semakin parah di tahun mendatang.

Sementara itu, Chalid menyatakan bahwa saat ini rakyat sudah tidak bisa lagi berharap kepada pemerintah untuk peduli terhadap nasib lingkungan hidup. Yang perlu dilakukan saat ini, katanya, adalah menggalang massa yang kritis dengan isu lingkungan hidup, termasuk membangun kekuatan politik alternatif.

"Tugasnya nanti untuk mendorong pemerintah agar mau menjalankan mandat yang salah satunya adalah mengurus persoalan lingkungan," katanya. ■ uli

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA		<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>									
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input checked="" type="checkbox"/> UMUM							
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	26 27 28 29 30 31									
HALAMAN : 19											TAHUN 2006

Dinding Tebing Ambrol, Dua Tewas

Total kerugian ditaksir Rp 100 juta.

DUNG — Dinding batu penahan tebing di kompleks peternakan sapi milik keluarga almarhum Haji Mulya di Kampung Panyairan Jompo, Desa Cigugur Girang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung, ambrol pada Ahad tengah malam lalu. Musibah ini menewaskan dua orang, yakni Sinta, 16 tahun, dan Cahyani, dua tahun enam bulan.

Korban tewas terperangkap di dalam rumah kayu yang terletak di bawah dinding penahan tebing. Reruntuhan dinding setinggi lebih dari enam meter dengan panjang sekitar 50 meter itu juga melukai pemilik rumah, Usin, yang tak lain juga orang tua Sinta dan Cahyani. Kini Usin dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, karena luka di bagian kaki.

Selain korban manusia, musibah ini menewaskan seekor sapi. "Kejadiannya mendadak, sekitar pukul 22.35 Minggu malam," kata pegawai Kecamatan Parongpong, Aceng Syarif, yang bertugas menangani musibah ini, di Bandung kemarin. Pada malam kejadian, kata Aceng, hujan me-

mang turun meski tidak terlalu lebat. Namun, aparat kecamatan yang bertugas menduga dinding batu ambrol akibat air limpaan dari peternakan di bagian atas tebing. Limpahan air ini membebani dinding penahan tebing. "Karena beban berat, dinding tidak kuat dan ambrol," katanya. Reruntuhan dinding ini juga menghancurkan kandang sapi. Berdasarkan keterangan Usin, pegawai peternakan sapi, peternakan ini memelihara sekitar 50 ekor sapi. Sebanyak 38 ekor sapi dikandangkan di peternakan

yang terletak di bagian atas tebing. Sedangkan 12 ekor lainnya dipelihara di kandang bagian bawah. Di sebelah kandang sapi inilah Usin dan keluarganya menempatinya sebuah rumah. Dua korban tewas baru berhasil dievakuasi kemarin pagi dan dimakamkan di pemakaman umum Kecamatan Parongpong. Aceng menaksir total kerugian dalam musibah ini mencapai Rp 100 juta. Kerugian ini berasal dari dinding batu, rumah, sapi yang mati, dan kandang yang runtuh tertimbun reruntuhan. Aceng menyarankan pemilik peternakan memin-

dahkan lokasi peternakan ke daerah yang lebih aman. Tebing di kawasan peternakan ini dinilai rawan ambrol ketika musim hujan. Apalagi dinding penahan tebing tidak dijamin kuat menahan air hujan terus-menerus. "Harus dipindahkan, katanya. Aceng sudah melaporkan peristiwa ini kepada Pemerintah Kabupaten Bandung. Tapi sampai saat ini belum ada keputusan apakah akan melarang daerah ini dijadikan peternakan atau tidak. "Kita tunggu saja respons dari pemerintah kabupaten," katanya.

● AHMAD FIK

**HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 4

TAHUN 2006

Hari Ini, Simulasi Tsunami Nasional

SIMULASI Tsunami Nasional 2006 akan digelar di Bali hari ini. Simulasi Drill rencananya digelar di Pantai Sindu di kawasan wisata Sanur dengan melibatkan 10 ribu orang.

Kegiatan ini akan dibuka Menteri Negara Riset dan Teknologi Kusmayanto Kadiman dan Menteri Pariwisata Jero Wacik. "Pelaksanaan kita mulai pukul 07.00 Wita dan diikuti instansi pemerintah seperti pemda, TNI/Polri, BMG, PMI, Satlak, warga, pelajar hingga wisatawan,"

kata Asisten Deputi Bidang Kebutuhan Iptek, Kementerian Ristek Pariatmono.

Simulasi ini akan di-setting selami mungkin. Meski warga dikumpulkan, mereka diminta menjalankan aktivitas apa pun tanpa diberitahu terjadinya gempa dan tsunami. Di tengah kesibukan warga, mereka akan dikejutkan oleh gempa 5,6 Skala Richter yang kemudian disusul munculnya gelombang tsunami dari laut. Lokasi evakuasi yang dipilih berjarak sekitar 3 km dari Pantai Sanur, tepatnya Lapangan Made Pica di Jalan Hangtuah, Sanur. Lapangan ini dipi-

lih karena memiliki ketinggian sembilan meter di atas permukaan laut. "Jadi, jika gelombang tsunami kita asumsikan mencapai lima meter, masyarakat masih bisa menyelamatkan diri menuju tempat yang lebih tinggi lagi atau melakukan penyelamatan secara vertikal," papar Pariatmono.

Sejumlah teknologi juga akan diikutsertakan dalam pelaksanaan Simulasi Drill 2006 ini. Seperti piranti TEWS (tsunami early warning system) melalui sirine dan gelombang radio atau dikenal FM RDS (radio data system).

(miftachul chusna)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2006

Jembatan Porong Mulai Dibongkar

SIDOARJO (SINDO) – Menjelang pembongkaran jembatan tol Porong yang rencananya dilakukan Rabu (27/12) besok, petugas Jasa Marga, kemarin, sudah mulai membongkar pembatas jembatan di sisi kanan dan kiri (*gatrill*) jembatan itu. Sementara untuk mengalihkan arus saat pembongkaran, di bawah jembatan tol Porong sudah dibuat jalan sementara yang bisa dilewati kendaraan.

Namun, apakah pembongkaran jembatan dilakukan serentak atau dari sisi barat dulu, Tim Penanggulangan Semburan Lumpur masih mengkajinya. Salah satu pertimbangannya, keberadaan jembatan tol Porong di atas jalur poros mengharuskan pembongkaran bisa dilakukan seaman mungkin. “Kami mengutamakan keselamatan pengendara, makanya kami cari cara terbaik dalam pembongkaran jembatan itu,” ujar Juru Bicara Timnas Rudi Novrianto, kemarin.

Kasat Lantas Polres Sidoarjo AKP Andi Yudianto yang dikonfirmasi menjelaskan, jika pembongkaran jembatan itu dilakukan serentak, Jalan Raya Porong akan ditutup total. Lain halnya jika pembongkaran jembatan yang melintang dari arah barat ke timur itu dilakukan bergantian dari sisi timur atau barat dulu. “Kalau dibongkar serentak dan Jalan Raya Porong ditutup, kendaraan dari arah Surabaya maupun Malang akan dilewatkan jalur alternatif, seperti dari Krian-Mojosari-Japanan-Gempol sampai pembongkaran selesai,” ujar AKP Andi.

Jika pembongkaran jembatan dari satu sisi, lanjutnya, pengalihan jalur dilakukan melalui jalan alternatif di bawah jembatan tol sebelah barat. Pengalihan jalur kendaraan akan dilakukan baik dari arah selatan maupun utara. Jika sisi timur jembatan sudah selesai dibongkar, kendaraan bisa melewati Jalan Raya Porong. Kemudian, giliran sisi barat jembatan tol yang akan dibongkar. “Saat pembongkaran jembatan berpotensi menimbulkan kemacetan karena arus kendaraan tak akan berjalan seperti sebelumnya,” lanjut Andi.

Untuk diketahui, sebelum jembatan tol dibongkar, kendaraan yang lewat bisa langsung melaju lurus. Saat pembongkaran dilakukan, kendaraan harus memutar. Pengendara dari arah selatan (Malang) akan langsung dibelokkan ke barat dan masuk di bawah jembatan sekitar 10 meter dari badan Jalan Raya Porong. (abdul rouf)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA
 SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 TABLOID KONTAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 **26** 27 28 29 30 31

HALAMAN : 64

TAHUN 2006

BERKAWAN LAPINDO

Terbenam dalam Lumpur

DI Porong, Sidoarjo, hidup tidak akan pernah lagi serupa ketika lumpur belum muncrat, meluap, dan membenamkan sebagian wilayah itu dalam cairan hitam pekat yang menerbitkan penderitaan ribuan manusia.

Menyembur pertama kali pada 29 Mei, lumpur itu bersumber di ladang eksplorasi gas PT Lapindo Brantas. Jawa Timur geger. Seluruh negeri terperangah. Sawah-sawah lenyap. Jalan putus. Rumah terendam. Kehidupan se-
rasa di ujung tanduk. Jutaan meter kubik lumpur telah meluap dari perut Porong, membikin sepuluh ribu lebih orang meninggalkan rumah mereka. Ada 2.300 rumah lenyap, 18 gedung sekolah raib.

Lumpur melahirkan 4.000 lebih penganggur karena pabrik mereka terbenam dalam-dalam. Keluarga Bakrie sebagai pemilik Lapindo Brantas terseret ke pusaran semburan. Pemerintah mengharuskan Lapindo menanggung semua kerugian. Keluarga terkemuka itu sang-

gup menyediakan dana hingga Rp 1,3 triliun. Ini sepersepuluh lebih kekayaan Rp 12 triliun Aburizal Bakrie—kini dia Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat—versi majalah *Forbes*.

Lumpur Lapindo masih terus membawa prahara. Akhir Oktober lalu, tujuh orang tewas akibat ledakan pipa gas bawah tanah milik Pertamina. Di atas zona waktu 2006, wajah Porong menghitam bencana dan penderitaan manusia....

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMERUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV **DES**
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 **24** 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 3

TAHUN 2006

Status Bencana Nasional untuk Lumpur Lapindo

JAKARTA — Muncul usulan, pemerintah tidak menunda-nunda penetapan status bencana alam nasional terhadap kasus semburan lumpur dari sumur pengeboran PT Lapindo Brantas Inc di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Hal ini untuk mencegah makin meluasnya bencana dan kian banyaknya korban.

"Jangan takut dianggap membela Grup Bakrie, karena semburan lumpur panas itu adalah bencana yang hampir mustahil ditanggulangi atau dihen-

tikan oleh upaya manusia," tandas Sekjen Partai Persatuan Daerah (PPD), Adhie M Massardi, Sabtu (23/12).

Adhie menjelaskan, laporan Tim Pemantau Semburan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk PPD, merekomendasikan agar pemerintah terlibat lebih jauh dengan bekal status bencana nasional itu. "Kerugian pemerintah lebih karena ketakutan kalau dikira melindungi Lapindo Brantas (Grup Bakrie). Padahal ini dua hal yang berbeda," ungapnya.

Tim Nasional Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang dibentuk pemerintah disarankan lebih fokus pada penanganan penduduk sekitar lokasi semburan lumpur. "Menangani korban bencana lumpur jauh lebih penting dan bersifat segera," tegas Adhie.

Ia meminta semua pihak melihat bencana tersebut dengan bijaksana dan tidak emosional. Hentikan berbagai polemik tentang siapa yang salah karena akan membuat situasi makin tak

menentu. "Jika tidak ada dorongan alam, maka musibah tersebut tidak mungkin menjadi hebat," katanya.

Lapindo sendiri dianggapnya telah menunjukkan tanggung jawab maksimal. "Jika musibah tersebut terjadi pada perusahaan asing pasti sudah pergi dan lepas tanggung jawab. Misalnya, ada beberapa perusahaan asing yang mencemari laut dan merusak lingkungan, tapi tidak bertanggung jawab secara penuh," ungap mantan juru bicara presiden Gus Dur itu. ■ osa